

Judul : Pebisnis Tempati Hampir Separuh Parlemen
Tanggal : Rabu, 02 Oktober 2019
Surat Kabar : Koran Tempo
Halaman : 2

Pebisnis Tempati Hampir Separuh Parlemen

Sebanyak 262 anggota DPR terafiliasi atau terlibat dalam 1.016 perusahaan.

Avit Hidayat
avit.hidayat@tempo.co.id

JAKARTA—K kalangan pengusaha menempati porsi cukup besar dalam komposisi anggota Dewan Perwakilan Rakyat periode 2019-2024 yang dilantik kemarin. Hasil penelusuran Yayasan Auriga Nusantara—lembaga non-pemerintah pemerhati isu sumber daya alam—dan *Tempo* menemukan 262 orang atau 45,5 persen dari 575 anggota DPR menduduki posisi penting atau terafiliasi dengan perusahaan. Nama mereka tercatat pada 1.016 perusahaan yang bergerak di berbagai sektor.

Jumlah ini ada kemungkinan bertambah lantaran belum mencakup sejumlah sumber data yang belum bisa diakses, seperti daftar calon tetap di Komisi Pemilihan Umum. Temuan ini juga hanya menghitung data perseroan terbatas, ti-

dak menyertakan kepemilikan anggota DPR pada persekutuan komanditer (CV) dan usaha dagang (UD).

Direktur Komunikasi Yayasan Auriga Nusantara, Syahrul Fitra, mengatakan hasil riset ini menunjukkan para legislator tersebut menjalankan usaha di bidang penyiaran, perdagangan umum, hingga industri ekstraktif. "Kami khawatir ini menimbulkan konflik kepentingan. Dampaknya, produk legislasi hanya menguntungkan investasi mereka," kata dia, kemarin.

Menurut Syahrul, konflik kepentingan berpotensi terjadi saat DPR membahas rancangan undang-undang yang bersinggungan dengan bisnis mereka. Dia memberi contoh DPR periode lalu yang mengesahkan revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi dan Undang-Undang Sumber Daya Air secara tergesa-gesa di akhir masa jabatan mereka.



Puan Maharani berb foto bersama anggota Fraksi PDIP DPR RI di gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, kemarin.

Dalam temuan Auriga dan *Tempo*, sebanyak 262 legislator berada di semua partai yang lolos ke parlemen. Yang terbanyak berada di PDI Perjuangan, Golkar, dan Gerindra. Sebagian dari mereka menduduki posisi penting di partai, seperti Andre Rosiade dari Gerindra, Aria Bima dari PDI Perjuangan, dan Bambang Soesatyo dari Golkar. Mereka juga rata-rata berasal dari daerah pemilihan di Pulau Jawa.

Andre diketahui memiliki dua perusahaan bernama PT Kaze International Selaras dan PT Hasil Usaha Anak Bangsa. Keduanya beralamat di Padang.

Aria Bima diketahui memiliki lima perusahaan yang beralamat di Semarang. Kelimanya adalah PT Surya Prada, PT Prada Yasa, Kencana, PT Kertabhumi, PT Kencana

Kirana Mandiri, dan PT Karsaning Tyas. Sesuai dengan data Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, perusahaan itu tercatat atas nama Yohanes Aria Bima Trihastoto. Aria menduduki jabatan komisaris dan direktur.

Adapun Bambang Soesatyo juga diketahui memiliki lima perusahaan, yakni PT Suara Rakyat Membangun, PT Seronga Energi, PT Purnama Gemilang Sinergi, PT Lestari Boemi Mandiri, dan PT Dharma Herbivora. Di perusahaan ini, nama mantan Ketua DPR tersebut tercatat sebagai direktur dan komisaris.

Banyaknya anggota DPR berlatar belakang pengusaha juga pernah diungkapkan Indonesia Corruption Watch. Menurut riset lembaga tersebut, dari 560 anggota DPR periode 2014-

2019, sebanyak 293 orang atau 53 persen berstatus pengusaha.

Saat dimintai konfirmasi, Andre tak membantahnya. "Perusahaan itu *udah gue closing*," katanya. Meski tak terkait langsung dengan bisnisnya, Andre tak menampik jika dirinya dikatakan menghabiskan dana miliaran rupiah selama pemilu lalu. "Saya enggak sampai habis belasan, tapi sudah miliaran rupiah," ujarnya.

Aria Bima juga mengakui sebagian perusahaan itu adalah miliknya, di antaranya Kertabhumi dan Kencana Kirana. Ia mengatakan Kertabhumi merupakan lembaga nonpemerintah di bidang lingkungan. "Kencana Kirana sudah ditutup," katanya. Ia juga meminta *Tempo* menyebut nama perusahaan lain yang diduga miliknya, kemudian

dia akan memverifikasinya.

Sedangkan Bambang hanya membenarkan memiliki PT Suara Rakyat Membangun. Ia pun tak mempermasalahkan jika para pengusaha menjadi anggota DPR. "Sebetulnya bagus, asal tidak ada konflik kepentingan dengan jabatannya sendiri," katanya.

Ketua Dewan Pimpinan Pusat Gerindra, Ahmad Riza Patria, juga tak mempersoalkan hal ini. Ia menganggap wajar jika pebisnis putar haluan menjadi legislator. "Untuk menghilangkan konflik kepentingan, kembali ke konsistensi partai. Bukti, selama sepuluh tahun di DPR, alhamdulillah enggak ada yang terlibat kasus korupsi," ujarnya.

● BUDIARTI UTAMI PUTRI | WINDY FLORENTIN | AVIT HIDAYAT

Berjanji Tak Ada Konflik Kepentingan

PENELUSURAN Yayasan Auriga Nusantara dan *Tempo* mendapati ada 262 orang dari total 575 anggota Dewan Perwakilan Rakyat periode 2019-2024 yang berlatar belakang pengusaha. Sebagian dari mereka memastikan tak bakal ada konflik kepentingan ketika di parlemen.

NASKAH: AVIT HIDAYAT | WINDY FLORENTIN
SUMBER: WINDY FLORENTIN

FOTO FOTO: TEMPO/DASRI
ROSIANE, DIA, TONYA/ANDRE
HIBRANOVIA, TWITTER/ANDRE
ROSIANE, TEMPO/SUBENTO

"Pengusaha kan ada skalanya. Kalau pengusaha, kan justru bagus. Untungnya kalau pengusaha jadi anggota di DPR, sudah mapan saat mengabdikan, enggak perlu uang." — Riza Patria (Gerindra)



"Kalau di negara maju, rata-rata politisinya mapan dulu. Sebetulnya bagus, asal tidak ada konflik kepentingan dengan jabatannya sendiri." — Bambang Soesatyo (Golkar)



"Tentu saya ingin memperjuangkan rakyat, kalau bisnis sudah jalan. Kami kan enggak maruk-maruk banget." — Andre Rosiade (Gerindra)



"Saya lebih menempatkan hal-hal yang *public-oriented*. Kepentingan pribadi, kapital, jadi nomor sekian. Rusak republik ini kalau kepentingan kapital mendominasi kebijakan Dewan." — Aria Bima (PDI P)

